



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016



**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2017**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2016.

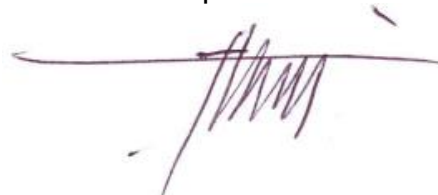
Diharapkan laporan ini dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2016 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Januari 2017

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Zulmalizar

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Impres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2016 yang menyajikan hasil pengukuran atas capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan. Secara umum capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal termasuk kedalam kategori “**sangat Baik**”, dengan total nilai sebesar **97,72 %**.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2016 antara lain :

a. Realisasi anggaran

Pagu DIPA	:	Rp. 27.664.299.000,-	
Realisasi DIPA	:	Rp. 26.939.008.258,-	(97,38%)
Sisa Anggaran	:	Rp. 3.935.764.750,-	(2,62%)

b. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Penyelesaian temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2016 sebanyak 2.009 rekomendasi dengan penyelesaian tindak lanjut sebanyak 1.779 rekomendasi (88,55%)

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap atase perindustrian di luar negeri sebanyak 3 kegiatan.
2. Penyusunan / pengumpulan/ pengolahan/ updating /analisa data dan statistik. program/kegiatan sebanyak 1 paket kegiatan.

d. Koordinasi Pengawasan

Koordinasi pengawasan dilakukan dengan unit kerja dan instansi terkait, antara lain:

1. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.

2. Kerjasama dengan BPKP dalam rangka penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Pedoman Monitoring dan Evaluasi atas Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja : Pedoman Survey Pendahuluan.
- e. Pendampingan pengukuran kinerja guna re-sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008 yang diperoleh pada bulan Oktober 2010 dari Badan Akreditasi (PT. TUV Nord Indonesia).
 - f. Ketatalaksanaan
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal telah melakukan penataan arsip di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan Arsip Nasional.
 - g. Sistem Informasi
Dalam rangka pemberian informasi dan peningkatan pengetahuan dan kompetensi aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, diterbitkan Majalah Solusi yang telah diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali penerbitan pada tahun 2016.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
B. Peran Strategik Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	2
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategik Organisasi	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2015	7
C. Rencana Anggaran	8
D. Dokumen Penetapan Kinerja	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Analisis Capaian Kinerja	11
B. Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV : PENUTUP	40
A. Keberhasilan	40
B. Permasalahan / Kendala	41
C. Upaya dan Strategi Pemecahan	41
L A M P I R A N	42
Penetapan Kinerja (PK)	43

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	3
Bagan 2. Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran, indikator dan target Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016	8
Tabel 2. Sasaran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2016	9
Tabel 3. Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016.....	10
Tabel 4. Sasaran meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan	12
Tabel 5. Capaian persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.....	12
Tabel 6. Perbandingan capaian persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan 6 tahun terakhir.....	13
Tabel 7. Capaian jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut pengawasan	14
Tabel 8. Capaian tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan	15
Tabel 9. Capaian tersedianya dokumen analisa hasil monev	15
Tabel 10. Capaian jumlah satuan kerja yang melakukan konsultasi	16
Tabel 11. Perbandingan Capaian Persentase jumlah satuan kerja melakukan konsultasi	17
Tabel 12. Capaian jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM.....	17
Tabel 13. Sasaran meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan progam dan pengendalian internal	18
Tabel 14. Capaian tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	18
Tabel 15. Capaian tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi	19
Tabel 16. Sasaran meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas.....	20
Tabel 17. Capaian persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor..	20
Tabel 18. Capaian persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	21
Tabel 19. Capaian terlayannya urusan administrasi kepegawaian	22
Tabel 20. Perbandingan capaian persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	22
Tabel 21. Sasaran terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	23
Tabel 22. Capaian Sistem Informasi dan Data Bahan Pengawasan	23

Tabel 23. Capaian tersedianya website Inspektorat Jenderal	24
Tabel 24. Capaian terbitnya majalah solusi.....	25
Tabel 25. Capaian jumlah profil satuan kerja yang terupdate.....	26
Tabel 26. Capaian tersedianya dokumen kebijakan pengawasan.....	26
Tabel 27. Capaian tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur.....	27
Tabel 28. Capaian persentase perbaikan SOP	28
Tabel 29. Capaian tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	29
Tabel 30. Capaian tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	30
Tabel 31. Capaian terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi.....	31
Tabel 32. Capaian Triwulan Sasaran Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	35
Tabel 33. Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016	37
Tabel 34. Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administratif, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
2. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
3. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
4. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pengawasan masyarakat;
- Pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan.

B. PERAN STRATEJIK ORGANISASI

1. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan

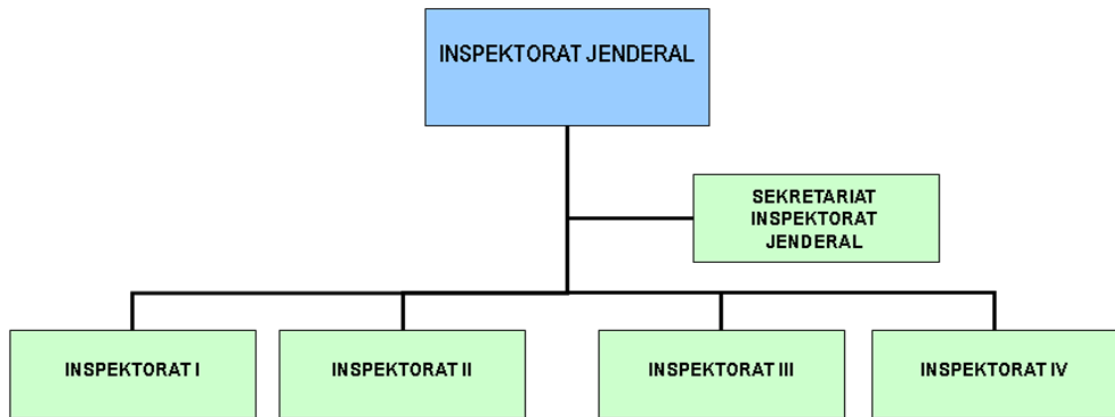
prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN.

2. Dalam menyikapi perkembangan tersebut, Inspektorat Jenderal bertekad untuk menerapkan paradigma baru dimana pengawas berperan sebagai mitra manajemen dengan melakukan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi selain melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan paradigma baru pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki peran strategik dalam memberikan dukungan manajemen dan peningkatan kapasitas kelembagaan Inspektorat Jenderal untuk penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan untuk memfasilitasi implementasi paradigma baru pengawasan dengan berperan penyediaan sarana dan prasarana, memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan penyediaan data dan informasi bahan pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program serta peningkatan kapasitas SDM pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- 1 (satu) eselon I,
- 5 (lima) unit eselon II,
- 4 (empat) unit eselon III,
- 12 (dua belas) unit eselon IV,
- Kelompok jabatan fungsional auditor, dan fungsional arsiparis.



Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Sementara itu struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari :



Bagan 2. Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Itjen merupakan satu dari lima unit Eselon IV di lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

1) Subbagian Program dan Anggaran.

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.

2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

2. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan

b. Penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan terdiri atas:

1) Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan.

Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal; dan

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

1) Subbagian Keuangan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal.

2) Subbagian Umum.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

4. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:

1) Subbagian Kepegawaian.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.

2) Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

VISI :

“Menjadi unit pendukung pengawasan yang professional, berintegritas, kompeten dan akuntabel untuk mewujudkan kegiatan pengawasan sebagai penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang perindustrian”

dengan

MISI :

Melayani Stakeholder secara profesional dengan :

1. Melaksanakan dukungan manajemen pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pengawasan yang baik;
2. Mengembangkan system pengawasan intern yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengawas yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Tujuan :

Tercapainya layanan dan dukungan dalam penyelenggaraan pengawasan, untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari KKN’

Perencanaan stratejik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka strategi yang digunakan adalah melalui program **"Peningkatan peran pelayanan pengawasan yang handal"** yang diturunkan menjadi kegiatan **"Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal"** dengan sasaran program:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengawas;
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatnya penerapan pengendalian internal;
5. Meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan;
6. Berkembangnya kemampuan APIP;
7. Terbangunnya organisasi efektif.
8. Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal.
9. Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016 melaksanakan kegiatan **"Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal"**

Dengan membuat perencanaan kinerja yang disusun pada bulan Juni 2015 dengan sasaran, indikator dan target tertuang pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)			
1	Meningkatnya Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Presentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	B
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	B
		Presentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85
3	Meningkatnya Pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Terbentuknya WBK/WBBM	2 satuan kerja

Perspektif Proses Internal			
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	80
2	Meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan	Jumlah auditi yang melakukan konsultasi	30
Perspektif Pembelajaran Organisasi			
1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Presentase pegawai yang mendapat diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90
2	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditi yang melakukan konsultasi	30
		Presentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90
3	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	B
		Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008	1
4	Sistem Informasi Pengawasan yang Handal	Presentase penyediaan data pengawasan tepat waktu	85
5	Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas	Presentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90

Tabel 1. Sasaran, indikator dan target Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016

C. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

Rencana kinerja pada tabel di atas dilakukan pembahasan kembali pada awal tahun 2016 untuk dijadikan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2016 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Pada tahun 2016, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga terdapat sasaran yang telah direncanakan pada tahun 2015 mengalami perubahan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2016 sehingga menjadi :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Presentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	86 %
		Jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	94 Satker
		Tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan	3 Dokumen
		Tersedianya dokumen analisa hasil monitoring dan evaluasi	1 Dokumen
		Jumlah satuan kerja melakukan konsultasi	24 Konsultasi
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	10 Satuan kerja
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen
		Tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi	12 Dokumen
3.	Meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas	Persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor	10%
		Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90 %
		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Sistem informasi dan Data Bahan Pengawasan	1 sistem
		Tersedianya website Inspektorat Jenderal	1 website
		Terbitnya majalah solusi	4 edisi
		Jumlah profil satuan kerja yang terupdate	94 Profil Auditi
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen
		Tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur	3 Dokumen
		Presentase perbaikan SOP	60 %
		Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 Dokumen
		Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1 Dokumen
		Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan

Tabel 2. Sasaran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2016

D. RENCANA ANGGARAN

Dalam tahun 2016, Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp.32.871.607.000,- kemudian setelah dilakukan pemotongan anggaran menjadi Rp.32.239.644.000,- dan dilanjutkan dengan pemotongan terakhir menjadi Rp.27.664.299.000,- mengalami revisi anggaran pada tiap-tiap kegiatan dalam pelaksanaannya. Dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

NO	KODE	KEGIATAN	VOLUME		ANGGARAN		
					SEBELUM REVISI	REVISI AWAL	REVISI AKHIR
1	1845.001	Sistem Informasi dan Data Bahan Pengawasan	98	Paket	1.486.018.000	1.474.818.000	1.260.012.000
2	1845.002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	94	Laporan	1.947.115.000	1.726.491.000	1.471.232.000
3	1845.003	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Program Inspektorat Jenderal	9	Dokumen	1.672.090.000	1.672.090.000	1.183.303.000
4	1845.004	Dokumen Norma/Standar/Pedoman/Ketentuan Pengawasan	2	Dokumen	757.400.000	692.600.000	285.000.000
5	1845.005	Dokumen Analisis Hasil Pengawasan	1	Dokumen	617.050.000	421.600.000	274.430.000
6	1845.006	Layanan Dukungan Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lainnya	1	Layanan	5.973.903.000	5.207.703.000	4.221.193.000
7	1845.007	Dokumen Administrasi Keuangan dan BMN	6	Dokumen	669.340.000	629.740.000	549.260.000
8	1845.008	Layanan Pengembangan SDM	1	Layanan	2.571.651.000	2.151.838.000	1.859.735.000
9	1845.009	Layanan Urusan Organisasi dan Tata Laksana	1	Layanan	1.200.040.000	1.113.790.000	761.510.000
10	1845.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	14.480.000.000	15.130.624.000	15.130.624.000
11	1845.995	Kendaraan Bermotor	2	Unit	1.142.000.000	752.500.000	378.000.000
12	1845.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14	Unit	140.000.000	140.000.000	140.000.000
13	1845.997	Perangkat dan Fasilitas Perkantoran	1	Unit	215.000.000	215.000.000	150.000.000
TOTAL ANGGARAN					32.871.607.000	31.239.644.000	27.664.229.000

Tabel 3. Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/ layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2015. Penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan melalui pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan, ***pencapaian kinerja kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2016*** sesuai *dengan* Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran perjanjian kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan**

Pada sasaran ini terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016, yaitu :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	86 %	88,55%	102,96 %
		Jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	94 Satker	94 Satker	100%
		Tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan	3 Dokumen	2 Dokumen	66,7%
		Tersedianya dokumen analisa hasil monev	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah satuan kerja melakukan konsultasi	24 Konsultasi	36 Konsultasi	150%
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	10 Satuan Kerja	5 Satuan Kerja	50%

Tabel 4. Sasaran meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan

a. Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.

Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar **86%**. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	86 %	88,55%	102,96 %

Tabel 5. Capaian persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dengan target 86 persen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 88,55 %.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II tercapai hingga sebesar 57,00%
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 57,18%
 - Triwulan IV tercapai hingga sebesar 88,55%
- Persen diperoleh dari persentase telah diselesaikannya 2.009 rekomendasi dari 1.779 rekomendasi hasil audit internal Inspektorat Jenderal pada tahun 2016.
- Capaian realisasi pada tahun 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun tahun sebelumnya. Realisasi capaian sasaran pada 5 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	82,38 %	82,35 %	85,8 %	86,44 %	86,35 %	88,55 %

Tabel 6. Perbandingan capaian persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan 6 tahun terakhir

- Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maupun target nasional, sasaran ini belum dibuat target spesifik per tahun, karena pada Renstra Itjen 2015 - 2019 yang disusun tahun 2014, masih menyebutkan dokumen koordinasi, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, belum ditargetkan persentase penyelesaian temuan hasil audit internal per tahun.
- Sasaran pada tahun 2016 dapat melampaui target yang ditetapkan, selain karena adanya pemantauan penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan ke tiap satuan kerja, juga didukung dengan pelaksanaan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan mengundang satuan kerja unit pusat maupun unit kerja vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

b. Jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut pengawasan

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi yang telah ditetapkan yaitu 94 Satker.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	94 Satker	94 Satker	100%

Tabel 7. Capaian jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut pengawasan

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan target 94 Satker. Untuk tahun 2016, semua satker telah dipantau penyelesaian tindak lanjut pengawasannya dengan mengirim tim untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi auditor. Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100,00 %.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
- Triwulan II tercapai hingga sebesar 20 Satker
- Triwulan III tercapai hingga sebesar 74 Satker
- Triwulan IV tercapai hingga sebesar 94 Satker

c. Tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi yang telah ditetapkan yaitu 3 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan	3 Dokumen	2 Dokumen	66,7%

Tabel 8. Capaian tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan dengan target 3 Dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 2 Dokumen.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II tercapai hingga sebesar 1 Dokumen
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 1 Dokumen
 - hingga Triwulan IV tercapai hingga sebesar 2 Dokumen
- Dokumen tersebut berupa Laporan APIP Semester dan Tahunan, 1 dokumen tidak dapat dibuat disebabkan adanya self blocking.

d. Tersedianya dokumen analisa hasil monev

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi yang telah ditetapkan yaitu 1 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Tersedianya dokumen analisa hasil monev	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 9. Capaian tersedianya dokumen analisa hasil monev

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator tersedianya dokumen analisa hasil monev dengan target 1 Dokumen. Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 2 Dokumen.
Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :
 - Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III belum dapat diukur
 - Triwulan IV tercapai hingga sebesar 1 Dokumen
- Dokumen tersebut berupa Laporan Analisa Temuan Berulang terhadap Satker.

e. Jumlah satuan kerja yang melakukan konsultasi

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi yang telah ditetapkan yaitu 24 konsultasi.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Jumlah satuan kerja melakukan konsultasi	24 Konsultasi	36 Konsultasi	150%

Tabel 10. Capaian jumlah satuan kerja yang melakukan konsultasi

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator jumlah satuan kerja melakukan konsultasi dengan target 24 konsultasi. Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 36 konsultasi.
Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :
 - Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II tercapai hingga sebesar 16 konsultasi
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 16 konsultasi
 - Triwulan IV tercapai hingga sebesar 36 konsultasi

- Konsultasi dilakukan melalui Klinik Itjen pada semester pertama sebesar 16 konsultasi dan pada semester kedua sebesar 20 konsultasi.
- Capaian realisasi pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi capaian sasaran pada 2 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian	Tahun 2015	Tahun 2016
Persentase jumlah satuan kerja melakukan konsultasi	237,50 %	150 %

Tabel 11. Perbandingan Capaian Persentase jumlah satuan kerja melakukan konsultasi

f. Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi yang telah ditetapkan yaitu 10 Satuan Kerja.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	10 Satuan Kerja	5 Satuan Kerja	50%

Tabel 12. Capaian jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan indikator jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dengan target 10 Satuan Kerja.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 5 Satuan Kerja.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
- Triwulan II belum dapat diukur
- Triwulan III tercapai hingga sebesar 3 satuan kerja
- Triwulan IV tercapai hingga sebesar 5 satuan kerja
- Jumlah satuan kerja yang diusulkan ke Kementerian PAN dan RB sebanyak 10 satuan kerja, namun hanya 5 satuan kerja yang memenuhi persyaratan.

- Capaian realisasi pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi capaian sasaran pada 2 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut :

2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016, yaitu :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Tabel 13. Sasaran meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 4 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Tabel 14. Capaian tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal dengan indikator tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran dengan target 4 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 4 dokumen.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III belum dapat diukur
 - Triwulan IV tercapai hingga sebesar 4 dokumen
- Dokumen perencanaan dan penganggaran adalah Satuan 3b, DIPA, RKAK/L, dan POK, kesemuanya untuk tahun 2017.

b. Tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 12 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Tabel 15. Capaian tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal dengan indikator tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi dengan target 12 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 12 dokumen.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai sebesar 3 dokumen
 - Triwulan II tercapai hingga sebesar 7 dokumen
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 7 dokumen
 - Triwulan IV tercapai hingga sebesar 12 dokumen
- Dokumen akuntabilitas dan evaluasi adalah sebaga berikut :
- Laporan Kinerja TA 2015 eselon I dan II;
 - Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan TW IV TA 2015 eselon I dan II;

- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan TW I TA 2016 eselon I dan II;
- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan TW II TA 2016 eselon I dan II;
- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan TW III TA 2016 eselon I dan II;
- Laporan Perjanjian Kinerja Tahun 2016;
- Laporan Rencana Kinerja Tahun 2016.

3. Meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016, yaitu :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas	Persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor	10%	9,5%	95%
		Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90%	90%	100%
		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 16. Sasaran meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas

a. Persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar 10%.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas	Persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor	10%	9,5%	95%

Tabel 17. Capaian persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas dengan indikator persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor dengan target 10%.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 9,5% Satuan Kerja.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III belum dapat diukur
 - Triwulan IV tercapai hingga sebesar 9,5%
- Diklat penjenjangan auditor yang diikuti adalah diklat auditor muda sebanyak 4 orang dari 42 auditor Inspektorat Jenderal.

b. Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas	Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90%	90%	100%

Tabel 18. Capaian persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas dengan indikator persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan dengan target 90%.
- Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 90% Satuan Kerja.
- Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :
- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II tercapai hingga sebesar 100%
 - Triwulan III tercapai hingga sebesar 100%
 - Triwulan IV tercapai hingga sebesar 100%
- Pada triwulan kedua, diadakan diklat pengembangan SDM di bulan Mei 2016 di Malang Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pegawai sebanyak 101 pegawai, honorer dan OB dilingkungan Inspektorat Jenderal.

- Capaian realisasi pada tahun 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Realisasi capaian sasaran pada 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut :

c. Terlayannya urusan administrasi kepegawaian.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 12 Bulan.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas	Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 19. Capaian terlayannya urusan administrasi kepegawaian

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas dengan indikator terlayannya urusan administrasi kepegawaian dengan target 12 bulan.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 12 bulan.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai sebesar 3 bulan
- Triwulan II tercapai hingga sebesar 6 bulan
- Triwulan III tercapai hingga sebesar 9 bulan
- Triwulan III tercapai hingga sebesar 12 bulan

Perbandingan Capaian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	99,88 %	99,82 %	100,00 %

Tabel 20. Perbandingan capaian persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan

4. Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal

Pada sasaran ini terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016, yaitu :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Sistem Informasi dan Data Bahan Pengawasan	1 sistem	1 sistem	100%
		Tersedianya website Inspektorat Jenderal	1 website	1 website	100%
		Terbitnya majalah solusi	4 Edisi	2 Edisi	50%
		Jumlah profil satuan kerja yang terupdate	94 Profil Auditi	94 Profil Auditi	100%
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen	Tidak tercapai	0%
		Tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Persentase perbaikan SOP	60%	100%	100%
		Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlayannya operasional dan organisasi	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 21. Sasaran terbangunnya organisasi organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal

a. Sistem Informasi dan Data Bahan Pengawasan.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 1 sistem.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Sistem Informasi dan Data Bahan Pengawasan	1 sistem	1 sistem	100%

Tabel 22. Capaian Sistem Informasi dan Data Bahan Pengawasan

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator Sistem informasi dan Data Bahan Pengawasan dengan target 1 sistem.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebanyak 1 sistem.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
- Triwulan II belum dapat diukur
- Triwulan III belum dapat diukur
- Triwulan IV tercapai hingga sebanyak 1 sistem

b. Tersedianya website Inspektorat Jenderal.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 1 website.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya website Inspektorat Jenderal	1 website	1 website	100%

Tabel 23. Capaian tersedianya website Inspektorat Jenderal

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator tersedianya website Inspektorat Jenderal dengan target 1 website.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
- Triwulan II belum dapat diukur
- Triwulan III belum dapat diukur
- Triwulan IV dapat tercapai 1 website

- Website Inspektorat Jenderal telah diluncurkan pada tanggal 14 Desember 2016.

c. Terbitnya majalah solusi.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 4 Edisi.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Terbitnya majalah solusi	4 Edisi	2 Edisi	50%

Tabel 24. Capaian terbitnya majalah solusi

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator terbitnya majalah solusi dengan target 4 edisi.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebanyak 2 edisi.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III belum dapat diukur
 - Triwulan IV dapat tercapai sebanyak 2 edisi
- Majalah solusi hanya dapat terbit sebanyak 2 edisi disebabkan *self blocking*.

d. Jumlah profil satuan kerja yang terupdate.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 94 Profil Auditi.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Jumlah profil satuan kerja yang terupdate	94 Profil Auditi	94 Profil Auditi	100%

Tabel 25. Capaian jumlah profil satuan kerja yang terupdate

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator jumlah profil satuan kerja yang terupdate dengan target 94 profil auditi.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai hingga 41 profil auditi
- Triwulan II tercapai hingga sebesar 89 profil auditi
- Triwulan III tercapai hingga sebesar 94 profil auditi
- Triwulan IV tercapai hingga sebesar 94 profil auditi

e. Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebanyak 1 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen	Tidak tercapai	0%

Tabel 26. Capaian tersedianya dokumen kebijakan pengawasan

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator tersedianya dokumen kebijakan pengawasan dengan target 1 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 0%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III belum dapat diukur
 - Triwulan IV tidak dapat diukur
- Kebijakan pengawasan masih dalam proses dan belum dapat dibuat sampai akhir tahun.

f. Tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebanyak 3 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Tabel 27. Capaian tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur dengan target 3 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
- Triwulan II belum dapat diukur
- Triwulan III belum dapat diukur
- Triwulan IV tercapai hingga sebesar 3 dokumen

g. Persentase perbaikan SOP.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar 60%.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Persentase perbaikan SOP	60%	100%	100%

Tabel 28. Capaian persentase perbaikan SOP

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator persentase perbaikan SOP dengan target 60 %.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I belum dapat diukur
 - Triwulan II belum dapat diukur
 - Triwulan III belum dapat diukur
 - Triwulan IV tercapai hingga sebesar 100%
- Semua SOP sebanyak 28 telah dilakukan perbaikan. SOP tersebut adalah sebagai berikut :
 - SOP Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan
 - SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
 - SOP Penerimaan Barang dan Jasa Hasil Pengadaan
 - SOP Penyimpanan Barang Persediaan
 - SOP Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pengadaan Langsung
 - SOP Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP
 - SOP Pelatihan di Kantor Sendiri
 - SOP Workshop Pengawasan
 - SOP Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan
 - SOP Surat Masuk
 - SOP Pengangkatan JFA

- SOP Pembebasan Sementara dan Pemberhentian JFA
- SOP Pemberhentian PNS
- SOP Perbaikan Absensi PNS
- SOP Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor
- SOP Kenaikan Pangkat PNS
- SOP Surat Keluar yang Diolah Kabag
- SOP Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
- SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Program (ROK)
- SOP Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Program Itjen
- SOP Perencanaan Pengawasan (PKPT)
- SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Program (ROK)
- SOP Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu
- SOP Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
- SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian
- SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat berkadar Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian
- SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat tidak berkadar Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

h. Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 1 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 29. Capaian tersedianya Laporan Keuangan dan BMN

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator tersedianya Laporan Keuangan dan BMN dengan target 1 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100 %.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai sebesar 1 laporan
 - Triwulan II tercapai sebesar 1 laporan
 - Triwulan III tercapai sebesar 1 laporan
 - Triwulan IV tercapai sebesar 1 laporan
- Laporan Keuangan dan BMN yang dibuat untuk tahun 2015.

i. Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 1 Dokumen.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 30. Capaian tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN dengan target 1 dokumen.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100 %.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai sebesar 1 laporan
 - Triwulan II tercapai sebesar 1 laporan
 - Triwulan III tercapai sebesar 1 laporan
 - Triwulan IV tercapai sebesar 1 laporan
- Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN yang dibuat untuk tahun 2015.

j. Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu 12 Bulan.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 31. Capaian terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi

- Capaian Sasaran Program/Kegiatan terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal dengan indikator terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi dengan target 12 bulan.

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%.

Pencapaian sasaran tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai sebesar 3 bulan
- Triwulan II tercapai sebesar hingga 6 bulan
- Triwulan III tercapai sebesar hingga 9 bulan
- Triwulan IV tercapai sebesar hingga 12 bulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Presentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	86 %	Belum dapat diukur	57 %	57,18 %	102,96 % (presentase tindak lanjut yang telah diselesaikan sebanyak 88,55 %)
		Jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	94 Satker	Belum dapat diukur (pemantauan tindak lanjut dilaksanakan setelah terbitnya Surat Pengantar Masalah dari Auditor)	20 Satker (pemantauan tindak lanjut masih berlangsung hingga akhir tahun)	74 Satker (pemantauan tindak lanjut masih berlangsung hingga akhir tahun)	94 Satker telah dipantau tindak lanjut hasil pengawasannya)
		Tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan	3 Dokumen	Belum dapat diukur (dokumen analisa pengawasan dalam tahap persiapan)	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
		Tersedianya dokumen analisa hasil monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	Belum dapat diukur (dokumen analisa hasil dalam tahap persiapan)	Belum dapat diukur (dokumen analisa hasil dalam tahap persiapan)	Belum dapat diukur (dokumen analisa hasil monev ditampilkan pada akhir tahun)	1 Dokumen analisa hasil monev telah dibuat yakni Laporan Analisa Temuan berulang terhadap Satker

		Jumlah satuan kerja melakukan konsultasi	24 Konsultasi	Belum dapat diukur	16 Konsultasi	16 Konsultasi	36 Konsultasi, 16 Konsultasi pada semester pertama dan 20 Konsultasi pada semester kedua
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	10 Satuan kerja	Belum dapat diukur (kegiatan masih dalam tahap persiapan)	5 Satuan Kerja	3 Satuan Kerja (kegiatan masih berlangsung hingga triwulan IV)	5 Satuan Kerja yang telah diusulkan menjadi WBK/WBBM (setelah melalui seleksi, hanya 5 Satker yang memenuhi persyaratan)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	Belum dapat diukur (kegiatan masih dalam tahap persiapan)	Belum dapat diukur (kegiatan masih dalam tahap persiapan)	Belum dapat diukur (kegiatan masih dalam tahap persiapan)	4 Dokumen perencanaan dan penganggaran telah dibuat untuk Tahun 2017 terdiri dari satuan 3b, DIPA, RKAK/L dan POK
		Tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi	12 Dokumen	3 Dokumen (dokumen LAKIP, Laporan PP 39 Triwulan IV tahun 2015, dokumen Perjanjian Kinerja)	7 Dokumen (dokumen LAKIP, Laporan PP 39 Triwulan IV tahun 2015, Laporan PP 39 Triwulan I tahun 2016, dokumen Perjanjian Kinerja)	7 Dokumen (dokumen LAKIP, Laporan PP 39 Triwulan IV tahun 2015, Laporan PP 39 Triwulan I dan II Tahun 2016, dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Kinerja)	12 Dokumen (dokumen LAKIP, Laporan PP 39 Triwulan IV tahun 2015, Laporan PP 39 Triwulan I, II dan III tahun 2016, dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Kinerja)

3.	Meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas	Persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor	10%	Belum dapat diukur (diklat perjenjangan auditor mengikuti jadwal dari BPKP)	belum dapat diukur, Karena mengikuti jadwal PUSDIKLAT BPKP	Belum dapat diukur (diklat perjenjangan auditor mengikuti jadwal dari BPKP)	9,5 % (diklat perjenjangan auditor diikuti oleh 4 orang dari 42 auditor)
		Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90 %	Belum dapat diukur	100% (diklat pengembangan SDM di Malang Jawa Timur, Mei 2016)	100%	100%
		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan	3 bulan	6 bulan	9 bulan	12 bulan
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Sistem informasi dan Data Bahan Pengawasan	1 sistem	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	1 sistem
		Tersedianya website Inspektorat Jenderal	1 website	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	1 Website telah dibuat dan telah dilaunching pada 14 Desember 2016
		Terbitnya majalah solusi	4 edisi	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	2 Majalah (2 Majalah tidak dapat terbit disebabkan adanya <i>self blocking</i>)
		Jumlah profil satuan kerja yang terupdate	94 Profil Audit	41 (Profil auditi sesuai dengan PKPT)	89 (Profil auditi sesuai dengan PKPT)	94 (Profil auditi sesuai dengan PKPT)	94 (Profil auditi sesuai dengan PKPT)
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen	-	Belum dapat diukur	-	Tidak tercapai
		Tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur	3 Dokumen	-	Belum dapat diukur	-	3 Dokumen
		Presentase perbaikan SOP	60 %	-	-	-	100 % (28 SOP telah mengalami

							perubahan semuanya)
		Tersedianya Laporan Pengawasan dan BMN	1 Dokumen	-	-	-	1 dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN telah dibuat
		Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan	3 bulan layanan	6 bulan layanan (sampai dengan Juni 2016)	9 bulan layanan (sampai dengan September 2016)	12 bulan layanan

Tabel 32. Capaian Triwulan Sasaran Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2016 mencapai Rp. 27.664.299.000,- yang dibiayai melalui *Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal*. Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.939.008.258,- atau 97,38% dari total pagu Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Secara rinci realiasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaporkan sebagai berikut :

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Sistem Informasi dan Data Bahan Pengawasan	1.260.012.000	1.231.861.094	97,77
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.471.232.000	1.461.544.981	99,34
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Program Inspektorat Jenderal	1.183.303.000	1.159.109.145	97,96
Dokumen Norma/Standar/Pedoman/Ketentuan Pengawasan	285.000.000	282.640.000	99,17
Dokumen Analisis Hasil Pengawasan	274.430.000	266.770.000	97,21
Layanan Dukungan Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lainnya	4.221.193.000	4.131.581.872	97,88
Dokumen Administrasi Keuangan dan BMN	549.260.000	534.404.882	99,30
Layanan Pengembangan SDM	1.859.735.000	1.825.376.325	98,15
Layanan Urusan Organisasi dan Tata Laksana	761.510.000	759.460.300	99,73
Layanan Perkantoran	15.130.624.000	14.676.609.051	97,00
Kendaraan Bermotor	378.000.000	320.068.508	84,67

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	140.000.000	139.998.600	99,99
Perangkat dan Fasilitas Perkantoran	150.000.000	149.583.500	99,72
Total	27.664.299.000	26.939.008.258	97,38

Tabel 33. Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016

Dilihat dari penyerapan anggaran, pada umumnya anggaran dapat terserap lebih dari 97 %, kegiatan dengan output kendaraan bermotor Inspektorat Jenderal capaian hanya tercapai sebesar 84,67 %. Hal itu disebabkan adanya self blocking dan beberapa kali penghematan.

Jika dilakukan analisa efisiensi sumber daya dengan melihat alokasi anggaran dan indikator guna pencapaian kinerja, dimana anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal umumnya secara simultan mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada tapkin. Namun terdapat anggaran yang bisa langsung dapat dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja dan terdapat anggaran yang tidak bisa langsung dikaitkan, sehingga tidak seluruh anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Presentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	86 %	- Pembinaan dan pengawasan Inspektorat Jenderal	1.926.123.000	1.922.336.368	99,80
				- Analisis dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	274.430.000	266.770.000	97,21
				- Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.062.443.000	1.052.710.681	99,08
				- Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut	317.243.000	317.243.000	100
		Jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	94 Satker	- Koordinasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Koordinasi Data Hasil Pemeriksaan Eksternal	38.166.000 53.380.000	38.108.000 53.243.500	99,85 99,74
		Tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan	3 Dokumen	- Analisis dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	166.630.000	161.970.000	97,20
		Tersedianya dokumen analisa hasil monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	- Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi	107.800.000	104.800.000	97,21
		Jumlah satuan kerja melakukan konsultasi	24 Konsultasi	- Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal	178.400.000	177.200.000	99,33
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	10 Satuan kerja	- Pembangunan Aksi dan Pencegahan dan	544.279.000	470.505.061	86,45

				Pemberantasan Korupsi			
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Inspektorat Jenderal	610.872.000	594.620.000	97,34
		Tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi	12 Dokumen	- Penyusunan Perjanjian Kerja dan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal - Penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Triwulanan (PP 39) - Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Inspektorat Jenderal - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian	48.175.000 132.175.000 40.500.000 351.581.000 246.170.000	48.175.000 132.175.000 40.500.000 342.588.330 241.720.835	100 100 100 97,44 98,20
3.	Meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas	Persentase auditor yang mengikuti diklat penjenjangan auditor	10%	- Workshop Pengawasan - Pelatihan di Kantor Sendiri	98.895.000 14.600.000	98.895.000 12.200.000	100 83,56
		Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90 %	- Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM - Capacity Building - Forum Pengawasan Inspektorat Jenderal	416.376.000 690.714.000 2.214.000	413.924.480 690.712.992 2.214.000	99,41 99,99 100
		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan	- Penatausahaan Urusan Kepegawaian - Keikutsertaan dalam Forum Kepegawaian	582.832.000 56.318.000	553.351.300 56.292.553	94,94 99,95
4.	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Sistem informasi dan Data Bahan Pengawasan	1 sistem	- Updating Data Bahan Pengawasan	971.808.000	966.283.894	99,43
		Tersedianya website Inspektorat Jenderal	1 website	- Penataan Sistem Informasi	116.323.000	113.617.000	97,67
		Terbitnya majalah solusi	4 edisi	- Penyusunan Majalah Solusi			
		Jumlah profil satuan kerja yang terupdate	94 Profil Auditi	- Updating Data Bahan Pengawasan	971.808.000	966.283.894	99,43
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen	-	-	-	-
		Tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur	3 Dokumen	- Penyusunan atau Reviu Pedoman/ Kebijakan/ Ketentuan Pengawasan	94.200.000	94.200.000	100
		Presentase perbaikan SOP	60 %	- Evaluasi Dokumen SOP	190.800.000	188.440.000	98,76
		Tersedianya Laporan Pengawasan dan BMN	1 Dokumen	- Evaluasi Laporan Keuangan dan BMN - Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Inspektorat Jenderal	111.611.000 160.540.000 370.020.000 18.700.000	111.611.000 149.405.000 358.049.882 18.700.000	100 93,06 96,77 100
		Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan	- Layanan Urusan Organisasi dan Tata Laksana	761.510.000	759.460.300	99,73

Tabel 34. Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016

Dilihat dari alokasi anggaran, semua kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan telah terbiayai. Dari sisi penyerapan anggaran terlihat adanya efisiensi penggunaan anggaran, dimana target tetap dapat dicapai namun tidak seluruh anggaran digunakan.

BAB IV P E N U T U P

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2016. secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2016 telah berjalan baik, tercermin dari tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Pelaksanaan pemeriksaan telah didukung oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan pelaksanaan updating data, untuk mendukung penyiapan data sebelum pelaksanaan audit, dan setelah pelaksanaan audit telah dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut. Capaian penyelesaian tindak lanjut pada tahun 2016 adalah 88,55% temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti.
4. Berdasarkan pendampingan dan audit eksternal terhadap sistem manajemen mutu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2016 telah menerbitkan Majalah Solusi per triwulan, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor.
6. Capaian kinerja program Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam tahun 2016 termasuk dalam kategori yang **sangat baik** dengan persentase **97,72%**

karena didukung adanya kerjasama serta iklim kerja yang kondusif di lingkungan Inspektorat Jenderal.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2016 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dokumen Kebijakan Pengawasan tidak dapat dilakukan disebabkan adanya pemotongan anggaran dan *self blocking*.
2. Anggaran tahun 2016 tidak seluruhnya terserap, disebabkan adanya *self blocking* dan penghematan beberapa kali.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Peraturan Kebijakan Pengawasan akan dilaksanakan pada tahun 2017.
2. Perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan pada tahun 2016 disusun dengan berupaya melakukan efisiensi anggaran pelaksanaan rapat koordinasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2016 ini disusun. yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Zulmalizar, MM

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Soerjono, MM

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ir. Soerjono, MM

Dra. Zulmalizar, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDRAL

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Presentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	86 %
		Jumlah satuan kerja yang dipantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	94 Satker
		Tersedianya dokumen analisa hasil pengawasan	3 Dokumen
		Tersedianya dokumen analisa hasil monitoring dan evaluasi	1 Dokumen
		Jumlah satuan kerja melakukan konsultasi	24 konsultasi
		Jumlah satuan kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM	10 Satuan kerja
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen
		Tersedianya dokumen akuntabilitas dan evaluasi	12 Dokumen
3	Meningkatnya profesionalisme integritas aparatur pengawas	Persentase auditor yang mengikuti diklat penjurangan auditor	10 %
		Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan	90 %
		Terlayannya urusan administrasi kepegawaian	12 Bulan

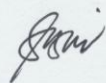
4	Terbangunnya organisasi efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan internal	Sistem Informasi dan Data Bahan Pengawasan	1 Sistem
		Tersedianya website Inspektorat Jenderal	1 Website
		Terbitnya majalah solusi	4 Edisi
		Jumlah profil satuan kerja yang terupdate	94 Profil Audit
		Tersedianya dokumen kebijakan pengawasan	1 Dokumen
		Tersusunnya pedoman/kebijakan/standar prosedur	3 Dokumen
		Prosentase perbaikan SOP	60 Persen
		Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN	1 Dokumen
		Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1 Dokumen
		Terlayannya operasional ketatausahaan dan organisasi	12 Bulan

Kegiatan

Dukungan manajemen, layanan manajemen, pembinaan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal

Anggaran
Rp 32.871.607.000,-


Inspektur Jenderal



Ir. Soerjono, MM

Jakarta, Januari 2016

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Dra. Zulmalizar, MM

**RENCANA KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Unit Pelaksana Teknis : Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tahun : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN		
Meningkatnya Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Presentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	B
	Presentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85
Meningkatnya Pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Terbentuknya WBK/WBBM	2
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL		
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Presentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	80
Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditi yang melakukan konsultasi	30
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI		
Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Presentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90
Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditi yang melakukan konsultasi	30
	Presentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90
Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	B
	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008	1
Sistem Informasi Pengawasan yang Handal	Presentase penyediaan data pengawasan tepat waktu	85
Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85
	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90

JAKARTA, JUNI 2015
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL


 ARUS GUNAWAN

